

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tengah berada di fase pembangunan, dimana aktivitas ekonomi digiatkan secara aktif untuk membangun dan menciptakan roda ekonomi yang bertumbuh dan berimplikasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan industrialisasi. Terdapat beragam sektor industri di Indonesia, di antaranya industri properti, industri pertambangan, industri agrikultur, industri jasa profesional, dan juga yang terakhir ada industri manufaktur. Perkembangan industri di Indonesia cukup massif, khususnya pada industri manufaktur. Pada 5 tahun terakhir ini, industri manufaktur di Indonesia mengalami kenaikan terus menerus, hal ini dibuktikan oleh *Share Manufacturing Value Added* (MVA) negara kita yang mengalami angka peningkatan dari tahun ke tahun (Harahap dkk., 2023). Artinya, sektor industri ini memiliki kontribusi yang nyata untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri juga berperan sebagai pembuka lapangan pekerjaan, dikarenakan sektor industri perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk operasionalnya, maka semakin banyaknya suatu industri didirikan, makin banyak pula kesempatan atau peluang kerja yang tersedia (Hayat dkk., 2025). Dengan demikian, sektor industri ini memberi manfaat bagi Sebagian besar Masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat atau pekerja disana.

Meskipun sektor industri berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, hubungan industrial yang terjalin antara pekerja dan perusahaan tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam praktiknya, pekerja masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, seperti upah yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, jam kerja yang melebihi ketentuan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Hubungan kerja pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan posisi antara pekerja dan pemberi kerja, di mana pekerja sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan Perusahaan (Kurniawan & Sitabuana, 2021). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hubungan industrial yang dapat berdampak

pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup pekerja, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Para pekerja yang mengalami dan terimplikasi pemutusan hubungan kerja (PHK) ini seringkali tidak mendapatkan hak dan jaminan yang sesuai dengan ketentuan, lebih parahnya banyak pekerja yang sama sekali tidak menerima atau tidak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan oleh perusahaan (Ikhsanty, 2024). sehingga kenyataan ini menempatkan para pekerja pada kerentanan. Dengan tidak adanya jaminan yang seharusnya para pekerja dapatkan dan seharusnya jaminan itu yang menyelamatkan mereka untuk kelangsungan hidup pasca pemutusan hubungan kerja (PHK), maka para pekerja akan rentan menjadi pengangguran dikarenakan tidak ada kepastian terkait pekerjaan, lalu rentan miskin dikarenakan kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan, kemudian rentan terjadi konflik dikarenakan kekecewaan mereka atas realitas pahit ini berpotensi berujung pada aksi protes atau konflik vertikal dengan perusahaan tempat mereka bekerja atau kepada para pemangku kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Maka dari itu, kerentanan sosial ini tentunya perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak terjerumus atau terjatuh kepada permasalahan sosial dan ekonomi. Jika kerentanan ini terus dibiarkan dan terus menerus berlangsung dalam kurun waktu lama dan berkelanjutan, maka resiko dan implikasi dari kerentanan ini akan semakin membesar (Mariana, 2024). Kerentanan dimiliki oleh sebagian besar pekerja sebagai masyarakat, problematika ini perlu menjadi sororan karena menyangkut keberlangsungan hidup dan hajat banyak orang.

Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 meningkat dibanding 2024, “saat ini terdata sekitar 24 ribuan, jadi sudah sepertiga lebih dari tahun 2024” ucap Yassierli, dikutip dari *Metrotvnews*, Jumat (9/5/2025). Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ini menyasar para pekerja di berbagai sektor termasuk industri dan korporasi, bahkan korporasi besar dan mapan sekalipun dikabarkan terimplikasi dan kesusahan juga (Gustati, 2025). Contohnya pada kasus Sritex, raksasa tekstil asal Sukoharjo, yang pada awal tahun ini melakukan pemutusan hubungan kerja

(PHK) massal dengan merumahkan sekitar 11.025 buruh atau pekerja akibat pailit. Para pekerja yang sebelumnya menjadikan perusahaan tersebut sebagai harapan hidup kini kehilangan arah. Hal ini berimplikasi pada sebanyak pekerja yang terkena imbas dari pemutusan hubungan kerja (PHK) ini, maka sebanyak itu pula pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatan dan sebanyak itu pula peningkatan angka pengangguran. Tidak hanya itu, masyarakat juga akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan juga masyarakat mengalami penurunan daya beli, hal ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhambat. Dari fenomena merefleksikan bahwasanya pekerja industri sedang berada dalam jurang kerentanan. Fenomena tersebut relevan untuk dipahami melalui perspektif Teori Masyarakat Risiko (*Risk Society*) Ulrich Beck yang menjelaskan bahwa perkembangan modernisasi dan industrialisasi tidak hanya menghasilkan kemajuan, tetapi juga melahirkan berbagai risiko dan ketidakpastian bagi masyarakat. PHK massal merupakan risiko sosial dalam masyarakat modern menurut Ulrich Beck, sedangkan kerentanan sosial merupakan konsekuensi yang dialami pekerja akibat risiko tersebut. Dalam konteks ini, eks pekerja PT. Danbi Internasional merupakan kelompok yang dihadapkan pada risiko sosial akibat kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan mereka.

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi pada Perusahaan berskala nasional seperti Sritex, akan tetapi juga terjadi pada Perusahaan manufaktur di Kabupaten Garut. Salah Satu yang cukup menyita perhatian adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di PT. Danbi Internasional Garut. PT. Danbi Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam perkembangannya perusahaan menghadapi berbagai permasalahan yang ditandai dengan perubahan kepemilikan perusahaan, penurunan aktivitas produksi, serta berbagai kendala operasional yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi stabilitas hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan semakin terlihat ketika terjadi pengurangan jam kerja dan menurunnya aktivitas produksi yang berimplikasi pada berkurangnya pendapatan pekerja. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam operasional perusahaan yang pada akhirnya mengarah pada kondisi yang lebih serius. Bagi pekerja, perubahan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Puncak dari permasalahan tersebut terjadi ketika PT. Danbi Internasional dinyatakan pailit yang kemudian diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerja. Peristiwa ini menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama bagi diri dan keluarganya. Selain kehilangan pekerjaan, para pekerja juga dihadapkan pada berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan pasca PHK. Kondisi ini menunjukkan bahwa PHK massal tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan semata, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang memengaruhi kehidupan pekerja dan keluarganya.

Secara normatif, pekerja yang mengalami PHK memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada kasus PT. Danbi Internasional Garut, para pekerja tidak hanya kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan utama, tetapi juga menghadapi berbagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang seharusnya diterima pekerja dengan realitas yang mereka alami pasca PHK. Fenomena PHK massal yang terjadi pada PT. Danbi Internasional Garut menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam kehidupan pekerja. Kehilangan sumber pendapatan, ketidakpastian pemenuhan kebutuhan hidup, serta belum terpenuhinya hak-hak pekerja pasca PHK dapat menempatkan pekerja pada kondisi yang rentan secara sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PHK bukan hanya persoalan

ketenagakerjaan, melainkan juga persoalan sosial yang memengaruhi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kerentanan sosial, bentuk-bentuk kerentanan sosial, serta implikasi sosial yang dialami eks pekerja pasca PHK massal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Kerentanan Sosial Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal (Penelitian pada Eks pekerja PT. Danbi Internasional di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Garut)".

B. Identifikasi Masalah

Pada saat setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Perusahaan dengan tidak memenuhi hak hak pekerja dan jaminan sosialnya, para pekerja menghadapi tantangan tantangan atau problematika permasalahan sosial. Dengan kondisi dan posisi seperti yang dijelaskan, pekerja berada dan ketidakpastian yang mana akan mengganggu kehidupan keluarga maupun sosialnya. Ketimpangan antara prosedur ideal dengan realitas sosial yang ada inilah yang kemudian menghadirkan atau menampilkan kerentanan sosial. Dari uraian tersebut, terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja menjadi rentan secara sosial akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dilakukan dengan tahapan/proses yang benar. tepat dan transparan, dengan tidak menjamin hak hak pekerja dan jaminan jaminannya terpenuhi secara adil.
2. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan ketidakpastian meningkatkan angka pengangguran.
3. Pekerja kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber pendapatan atau pemasukkan utama, yang mana aspek ini menunjang kelangsungan kehidupan.
4. Pekerja rentan jatuh dalam kemiskinan, tidak menutup kemungkinan para pekerja akan terjerumus pada jurang kemiskinan jika kerentanan ini dibiarkan dan terus bergulir dalam jangka waktu yang Panjang.

5. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kondisi ini rentan untuk memicu konflik, terutama konflik vertical antara pekerja dengan Perusahaan atau antara pekerja dengan pemangku kebijakan atau pihak yang seharusnya memastikan dan menjamin hak-hak dari pekerja itu terpenuhi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah disebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan dinamika PHK massal sebagai risiko sosial yang melatarbelakangi munculnya kerentanan sosial pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan?
2. Bagaimana bentuk kerentanan sosial akibat risiko sosial yang dialami oleh para pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan?
3. Bagaimana Implikasi sosial dari kerentanan sosial yang dirasakan para pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi dan dinamika PHK massal sebagai risiko sosial yang melatarbelakangi munculnya kerentanan sosial pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan
2. Bagaimana bentuk kerentanan sosial akibat risiko sosial yang dialami oleh para pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan
3. Untuk mengetahui Implikasi sosial dari kerentanan sosial yang dirasakan para pekerja PT. Danbi Internasional Garut di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademik maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Akademik

- a) Penelitian ini berguna untuk memperkaya Khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dalam mengkaji kerentanan sosial akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada para pekerja, terutama pekerja di PT. Danbi Internasional Garut.
- b) Adapun bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama wawasan dalam kajian Sosiologi Industri mengenai informasi pengetahuan tentang kerentanan sosial akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada para pekerja.

2. Kegunaan Praktis

Adapun dalam penelitian ini, selain memiliki kegunaan teoritisnya peneliti pun memaparkan kegunaan praktis dari penelitian yang dilakukan, diantaranya:

a) Kegunaan untuk peneliti

Adanya penelitian ini memberikan banyak manfaat dan kegunaannya bagi peneliti. Di mana, sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam proses aplikasi pemahaman mengenai ilmu sosial secara umum dan dalam memahami kerentanan sosial akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada para pekerja PT. Danbi Internasional Garut

b) Kegunaan untuk Masyarakat

Masyarakat terutama mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini untuk memahami kerentanan sosial, bentuk, dan bagaimana mahasiswa memahami kerentanan sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan akan mempermudah masyarakat dan mahasiswa dalam memahami bentuk dari kerentanan sosial.

F. Kerangka Berpikir

Kerentanan sosial merupakan sifat yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam lingkungan sosial yang dijalankan dan dihadapinya. Kerentanan ini ditentukan oleh beberapa aspek yang mempengaruhinya dan hadir oleh sebab akibat yang ditimbulkan oleh dinamika sosial atau fenomena sosial. Dalam penelitian ini, akan dikaji terkait kerentanan sosial pekerja industri akibat dari fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pemutusan hubungan kerja (PHK) umumnya mengakibatkan stabilitas sosial dan ekonomi terganggu dengan mulai dari meningkatkan angka pengangguran hingga kepada konflik, yang mana pada akhirnya situasi ini berimplikasi secara sosial dan ekonomi kepada para pekerja yang menjadi korban.

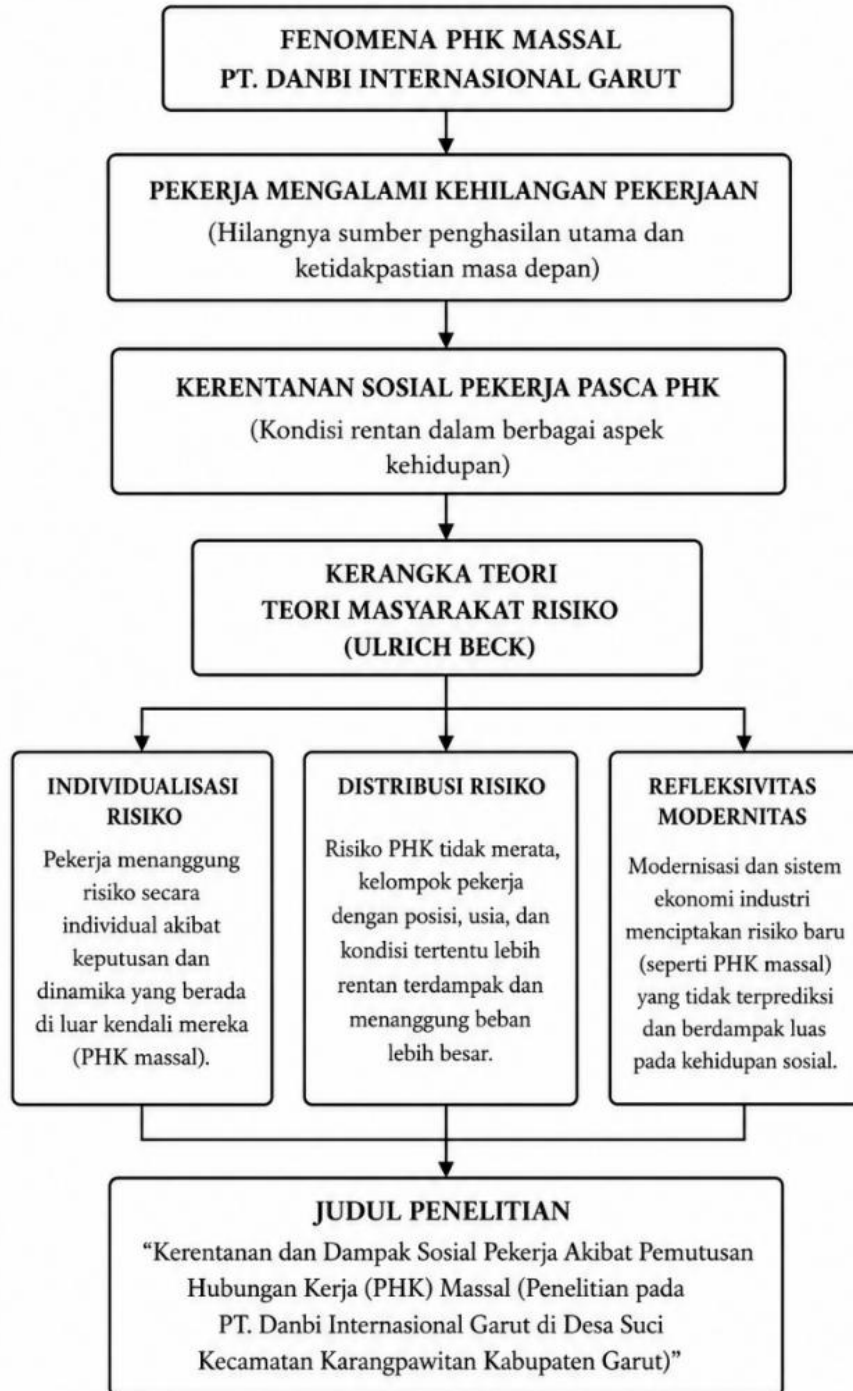
Kerangka pemikiran dari, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi bentuk krisis yang mengakibatkan kerentanan sosial bagi para pekerja, yang ditandai dengan terputusnya hubungan kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan para pekerja sehingga para pekerja kehilangan sumber pendapatan atau pemasukkan mereka dan menghadapi ketidakpastian nasib paska pemutusan hubungan kerja (PHK) masal tersebut, kemudian menempatkan mereka dalam jurang kerentanan sosial. Pada penelitian yang telah dilakukan, para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terkena efek ganda, yang artinya implikasi pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya berimbas kepada dimensi ekonomi saja, melainkan juga berimplikasi kepada aspek sosial. Keadaan ini mengancam dan memungkinkan menciptakan masalah sosial yang kompleks, seperti terjadinya disintergrasi sosial, pengangguran yang meningkat, protes dari buruh sampai aksi demonstrasi yang bisa menggoyangkan stabilitas politik dan sosial (Mariana, 2024). Maka dari uraian tersebut, terdapat kausalitas yang cukup kuat antara pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kerentanan sosial pekerja.

Kerentanan sosial yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) ini menandakan adanya struktur sosial yang belum kuat dan rentan, dilihat dari bagaimana permasalahan atau problematika ini bisa muncul. Dengan menggunakan teori Masyarakat Risiko dari Ulrich Beck, kita bisa menganalisis bagaimana kerentanan tersebut bisa terbentuk dengan ketidakpastian dan risiko yang

ditanggung oleh pekerja terhadap dinamika sosial yang terjadi padanya. Dengan menggunakan dimensi konseptual dari teori masyarakat berisiko seperti individualisasi risiko, distribusi risiko dan refleksi modernisasi akan menjelaskan terkait bagaimana kerentanan atau risiko ini adalah konsekuensi dari perkembangan industri, kemudian menjelaskan pergeseran dimana risiko kerentanan ini harusnya menjadi tanggung jawab institusi sosial namun bergeser dan ditanggung kepada individu itu sendiri atau dalam konteks ini pekerja itu sendiri, lalu akan menjelaskan terkait adanya ketimpangan pada distribusi risiko yang mana kelompok rentan akan menanggung risiko yang lebih besar hingga pada akhirnya dimensi konsep ini akan menjelaskan bagaimana pekerja atau kelompok rentan atau yang menanggung risiko ini akan sadar dan merefleksikan diri menyadari risiko yang mereka tanggung dan mulai menuntut perubahan kebijakan sosial. Dan dimensi konsep Ulrich Beck tersebut digunakan untuk mengetahui implikasi sosial ekonomi dari fenomena yang telah dipaparkan.



KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir